



## Dinamika Pelaksanaan Kebijakan Keamanan Pangan Lokal dalam Pencegahan Stunting

Rizka Ariyanti<sup>1</sup>, Rahmadani Yusran<sup>2</sup>, Zikri Alhadi<sup>3</sup>, Hasbullah Malau<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang, Indonesia

[yusranrdy@fis.unp.ac.id](mailto:yusranrdy@fis.unp.ac.id)

### Article Info

#### Article history:

Received October 26<sup>th</sup>, 2022

Revised November 3<sup>rd</sup>, 2022

Accepted December 9<sup>th</sup>, 2022

#### Keywords:

Food Safety

Local Food

Stunting Prevention

Policy Strategies

### ABSTRACT

*This study aims to explain the dynamics of local food safety policy strategies in Agam District in preventing stunting in Nagari Kamang Hilia. Nagari Kamang Hilia has extensive land for agricultural and plantation growth and has the potential to become alternative land for the development of local crops to support local food security policies, especially in preventing stunting. This study uses a qualitative method. Data was collected through interviews and documentation. The research informants were determined by purposive sampling. The research results prove that the implementation of the local security policy strategy is not implemented in accordance with the policy objectives. This is caused by factors namely the food crops that are conserved are not in accordance with local commodities in Nagari, studies on local food are not carried out in depth; budget constraints; lack of program oversight from the Regency Government or Nagari Government for areas experiencing land problems, lack of professional experts in the field of local food safety and lack of transparency on stunting data from the cadre posyandu to Nagari Kamang Hilia.*

*This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2022 by the author(s).*



#### Corresponding Author:

Rahmadani Yusran

Departemen Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

[yusranrdy@fis.unp.ac.id](mailto:yusranrdy@fis.unp.ac.id)

## PENDAHULUAN

*Stunting* merupakan kondisi kegagalan pertumbuhan balita karena tidak terpenuhinya gizi dalam waktu lama. Dampak yang dialami oleh balita dengan *stunting* yaitu tidak memiliki kecerdasan sebagaimana mestinya, menjadi rentan terhadap penyakit, dan berisiko pada penurunan produktivitas. Ciri fisik yang paling terlihat dan umum diketahui oleh masyarakat adalah: pertumbuhan anak lebih pendek jika dibandingkan dengan usianya (TNP2K, 2017; Kementerian PPN/Bappenas, 2018). Prevalensi *stunting* di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan dunia sebesar 30,8 % dengan perbandingan dunia sebesar 22% pada tahun 2018 (Candra, 2020). Kajian kebijakan pencegahan *stunting* banyak menjadi sorotan berbagai pihak. Misalnya (Kinanti, 2022) yang mengkaji peningkatan koordinasi kebijakan pencegahan *stunting* di kalangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Padang. Kemudian (Sari, 2022) melihat tentang peningkatan capaian konvergensi kebijakan dalam pencegahan *stunting*. (Sari, 2021) tentang sinkronisasi pemahaman mengatasi *stunting* pada balita antara pihak berwenang dan masyarakat. Ada juga tentang optimalisasi peran Nagari dalam mewujudkan capaian tujuan kebijakan pencegahan *stunting* (Febrian, 2021).

Penelitian-penelitian di atas memiliki kesimpulan bahwa kebijakan pencegahan *stunting* belum berhasil dalam mengatasi permasalahan tersebut. Pemerintah Daerah, OPD dan masyarakat belum memiliki pandangan yang sama tentang cara mengatasi permasalahan *stunting*. Hal ini, mengindikasikan tujuan kebijakan pencegahan *stunting* belum berhasil dicapai. Untuk itu, pemerintah menetapkan beberapa peraturan, yaitu Perpres No. 83 tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, Permen PPN/Kepala Bappenas No. 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi yang menetapkan RAN-PG, Pedoman Penyusunan RAD-PG, dan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi RAN/RAD-PG. Strategi nasional menggunakan pendekatan lima pilar pencegahan *stunting*, yaitu: (1) Komitmen dan visi kepemimpinan; (2) Kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku; (3) Konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program pusat, daerah, dan desa; (3) Gizi dan ketahanan pangan; (4) Pemantauan dan evaluasi (Kementerian PPN/Bappenas, 2018).

Kemudian, berdasarkan Kepmen PPN/Kepala Bappenas No.KEP.42/M.PPN/HK/04/2020 tentang penetapan perluasan kabupaten/kota, menyatakan bahwa fokus intervensi penurunan *stunting* terintegrasi tahun 2021 di terletak di Kabupaten Agam. Program ini dilaksanakan OPD terkait seperti, Bappeda, DPMN dan pihak lainnya. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Agam, Bapak Welfiar, faktor yang mempengaruhi bertambahnya daerah lokus *stunting* di Kabupaten Agam karena rendahnya pola makan atau konsumsi pangan masyarakat. Pemerintah kabupaten melalui Dinas kesehatan, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan serta Dinas Pertanian mengungkapkan hal yang paling penting diperhatikan dalam ketahanan pangan ialah mengutamakan dan memadukan inisiatif dan potensi sumber daya lokal. Dalam penurunan *stunting* menggunakan pendekatan pilar ke 4 gizi dan ketahanan pangan sebagai bagian dari 5 lipat pencegahan *stunting* (ANTARA, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana kebijakan keamanan pangan di Kabupaten Agam? Bagaimana cara agar hasil produksi komoditas tanaman pangan dapat berdaya saing dan bernilai tambah?

## METODE

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Metode deskriptif dilakukan secara sistematis, faktual dan akurat untuk menggambarkan fakta, ciri dan hubungan fenomena yang diteliti (Mulyana, 2008). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelusuran sumber data berupa wawancara dan dokumen yang validitasnya diuji dengan metode triangulasi sumber. Analisis data menggunakan teknik reduksi dan penyediaan data (Sugiyono, 2012). Informan penelitian antara lain beberapa OPD dan seluruh masyarakat yang terlibat dalam keamanan pangan lokal dalam pencegahan *stunting* di Nagari Kamang Hilia, Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan; Bagian Seksi Mutu dan Keamanan Pangan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan; Kepala UPT BP3 Dinas Pertanian; Bidang Seksi KESGA-GIZI Dinas Kesehatan; Kepala UPT Pertanian Kecamatan Kamang Magek; Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas Kamang Magek; Wali Nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek; Koordinator Kelompok Tani, Kader Posyandu dan keluarga yang terdampak *stunting* di Nagari Kamang Hilia. Melalui Informan penelitian ini, digali informasi terkait strategi kebijakan keamanan pangan lokal dalam pencegahan *stunting*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan keamanan pangan lokal menjadi penting bagi masyarakat Nagari Kamang Hilia dalam mencegah *stunting*. Sesuai dengan kondisi alam dengan luas lahan yang besar menjadikan Nagari Kamang Hilia sebagai alternatif mengembangkan berbagai tanaman lokal dalam mendukung program pemerintah. Kondisi ini, sejalan dengan dijadikannya Kabupaten Agam sebagai daerah lokus *stunting* dan rendahnya pola makan atau konsumsi pangan bergizi masyarakat (Welfiar, 2020). Untuk itu pemerintah daerah telah menerapkan diversifikasi pangan lokal yang terfokus pada satu komoditas utama. Usaha tersebut dilakukan dengan memanfaatkan lahan pekarangan marjinal melalui Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dan peningkatan produksi dan produktifitas tanaman tahunan penyegar. Melalui strategi ini, pemerintah daerah berharap upaya pencegahan *stunting* dapat dilakukan.

**Tabel 1. Luas Lahan Kecamatan Kamang Magek 2016**

No	Nagari	Sawah (ha)	Lahan Kering (ha)	Jumlah
1.	Kamang Hilia	354,0	1.945,00	2.299,0
2.	Kamang Mudiak I	305,0	1.962,00	2.267,0
3.	Kamang Mudiak II	283,0	779,5	1.062,5
4.	Kamang Mudiak III	421,0	3.160,5	3.581,5
5.	Magek	443,0	307,00	750,0

**Sumber: UPT BP4K2P Kecamatan Kamang Magek**

Namun demikian, pelaksanaan kebijakan keamanan pangan lokal ini belum sesuai dengan tujuannya. Penelitian ini menghasilkan sejumlah faktor yang menyebabkan tujuan kebijakan belum tercapai. *Pertama*, kebijakan keamanan pangan lokal tidak didukung oleh anggaran yang memadai.

Permasalahan ini juga dipengaruhi Pandemi Covid-19 yang mengancam bahkan menutup berbagai program Dinas Kabupaten Agam karena sebagian besar dana disalurkan untuk penanganan wabah tersebut. Selain itu, keterbatasan anggaran telah menyebabkan terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan lahan pekarangan sebagai salah satu peningkatan produksi tanaman dalam pencegahan stunting dan sebagai pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

*Kedua*, pelaksanaan kebijakan keamanan pangan lokal tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di nagari. Pengembangan tanaman lokal yang dilakukan pemerintah daerah tidak sesuai dengan jenis tanaman yang dibutuhkan masyarakat dan tidak sesuai dengan lahan pertanian dan pekarangan masyarakat. Jenis pangan lokal yang sesuai dengan pangan lokal di Nagari Kamang Hilia yaitu berupa ubi-ubian dan jagung. Namun, dalam pelaksanaannya bibit tanaman yang disediakan bukan dari jenis tanaman tersebut. Hal ini menjadi faktor penghambat dalam pemenuhan asupan gizi masyarakat. Masyarakat lebih mengutamakan menanam tanaman untuk kebutuhan pokok keluarga seperti tanaman rempah, obat-obatan dan lainnya yang tidak termasuk kedalam pencegahan *stunting*.



**Gambar 1. Kebun Tanaman Pangan Lokal yang Dikelola Oleh Masyarakat**

Kebijakan keamanan pangan lokal Kabupaten Agam bertujuan untuk pencegahan stunting dikalangan masyarakat. Namun demikian, banyak dari masyarakat kurang memanfaatkan tanaman pangan lokal dari pemerintah. Masyarakat di Nagari Kamang Hilia mempunyai komoditas tanaman pangan lokal berupa padi dan ubi-ubian terutama ubi jalar dan ubi kayu. Secara kebutuhan peningkatan gizi dan tumbuh kembang anak ubi jalar dan ubi kayu dapat dimanfaatkan untuk pencegahan *stunting* dengan mengkreasikan makanan yang akan diberikan kepada anak. Masyarakat juga memanfaatkan tanaman pangan lokal tersebut untuk pembuatan kerupuk kamang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dengan menjual hasil tanaman tersebut.

Perilaku masyarakat terhadap program pencegahan *stunting* juga sangat sensitif. Apalagi masyarakat yang sudah terkena dampak *stunting*. Dalam pemeriksaan yang dilakukan dalam

Posyandu, banyak masyarakat yang tidak menerima berbagai saran dari kader Posyandu maupun dari bidan desa. Seorang narasumber masyarakat menyatakan bahwa mereka tidak aktif dalam kegiatan Posyandu karena takut dianggap balitanya mengalami masalah *stunting*. Ketiga, pelaksanaan strategi kebijakan keamanan pangan lokal tidak didukung sumber daya manusia dan sumber daya alam. Salah satunya yaitu tidak ada tenaga ahli dibidang peningkatan kualitas tanaman pangan lokal. Hal ini mengakibatkan lambatnya perkembangan produksi tanaman penyegar dan berkualitas tinggi sebagai salah satu asupan gizi masyarakat. Selain itu, dalam pemanfaatan lahan pekarangan kantor atau rumah terdapat struktur tanah yang tidak memungkinkan untuk menanam pangan lokal disekitar lingkungan kantor maupun rumah. Lahan yang tidak sesuai dengan tempat perkembangan tanaman pangan lokal menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi kebijakan keamanan pangan lokal. Sehingga dalam meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman pangan lokal Nagari tidak terlaksana dengan baik.

*Keempat*, aspek kelembagaan juga menjadi faktor penghambat pelaksanaan kebijakan keamanan pangan lokal dalam pencegahan *stunting* yaitu pada bagian data peningkatan pencegahan *stunting*. Banyak nagari yang tidak mendapatkan data mengenai anak yang terdampak *stunting* oleh pemerintah, sehingga menyebabkan pihak nagari lambat untuk mengeluarkan kebijakan untuk menangani permasalahan ini. Hal lainnya juga dibuktikan dengan tidak terbukanya data kepada Nagari Kamang Hilia oleh kader Posyandu. Pemerintah Nagari Kamang Hilia tentu perlu informasi jelas bagaimana penurunan *stunting* di Nagari mereka berikut dengan tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah Nagari. Kader Posyandu sulit untuk bekerjasama dalam transparansi data dengan pemerintah Nagari Kamang Hilia. Hal ini menghambat pergerakan dalam pencegahan *stunting*. Kader posyandu juga kesulitan dalam membantu pemerintah daerah dalam pencegahan *stunting* melalui keamanan pangan lokal. Ketersediaan dan kemudahan akses data menjadi salah satu cara mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.

Penelitian ini menemukan bahwa strategi keamanan pangan lokal dalam mendukung upaya pencegahan *stunting* sangat perlu dan mendesak dilakukan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pangan yang bergizi. Strategi kebijakan keamanan pangan lokal yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Agam melalui OPD ternyata memerlukan kajian mendalam bersama masyarakat. Hal ini disebabkan ketidaksesuaian tanaman pangan yang diberikan oleh pemerintah dengan kondisi tanah masyarakat.

## KESIMPULAN

Strategi kebijakan keamanan pangan lokal sangat dibutuhkan di daerah. Apalagi disaat meningkatnya kebutuhan pangan dan menurunnya akses dan asupan gizi masyarakat terhadap pangan lokal sebagai alternatif pencegahan *stunting*. Pemanfaatan lahan yang tersedia di lingkungan masyarakat untuk pengembangan jenis tanaman pangan lokal mendesak dilakukan. Namun demikian, dinamika yang berlangsung di Kabupaten Agam khususnya di Nagari Kamang Hilia, kebijakan ini tidak berlangsung sebagaimana mestinya. Beberapa komoditas pangan alternatif pemerintah tidak sesuai dengan kondisi lahan. Akibatnya, pangan alternatif untuk peningkatan akses gizi masyarakat dalam pencegahan *stunting* tidak tercapai. Hal ini dapat menjadi pembelajaran yang baik bagi pemerintah ke depannya. Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan kajian yang mendalam dalam melaksanakan strategi kebijakan ini. Dengan demikian, harapan terhadap terpenuhinya pangan alternatif dan akses pangan bergizi masyarakat dalam mendukung pencegahan *stunting* dapat dilakukan.

## REFERENSI

- Abd alrazik Desogi, M., Khalid, F. A., Mohamed, A. K., Hamza, A. M., Mohammed, S. S., Abdalla, A. O., & Mohammed, A. A. (2022). Effect of Household Food Insecurity on the Nutritional Status of Children under Five in North Kassala; Kassala State, Eastern Sudan. *Journal of Food Security*, 10(1), 25-31.
- Amadou, I., & Lawali, S. (2022). Smart management of malnutrition using local foods, sustainable initiative for developing countries. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 18.
- Candra, Aryu. 2020. *Epidemiologi Stunting*. Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang.
- Deddy Mulyana. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Febrian, F., & Yusran, R. (2021). Koordinasi dalam implementasi kebijakan pencegahan stunting di Kota Padang. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 11-21.
- Guell, C., Brown, C. R., Navunicagi, O. W., Iese, V., Badrie, N., Wairiu, M., ... & Unwin, N. (2022). Perspectives on strengthening local food systems in Small Island Developing States. *Food security*, 1-14.
- Iqbal, M., & Yusran, R. (2021). Upaya Konvergensi Kebijakan Pencegahan Stunting di Kota Padang. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 109-116.
- Kinanti, A., & Yusran, R. (2022). Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No.KEP.42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten /Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2018). *Pedoman Pelaksana Intervensi Penurunan Stunting Terintegritas di Kabupaten/Kota*. Jakarta.
- Nordhagen, S., Lambertini, E., DeWaal, C. S., McClafferty, B., & Neufeld, L. M. (2022). Integrating nutrition and food safety in food systems policy and programming. *Global Food Security*, 32, 100593.
- Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi yang menetapkan RAN-PG, Pedoman Penyusunan RAD-PG, dan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi RAN/RAD-PG.
- Stunting Berbasis Nagari di Nagari Kajai Pasaman Barat. *Journal of Civic Education*, 5(3), 293-300.
- Sari, D. P., & Yusran, R. (2022). Evaluasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Nagari Pulakek Koto Baru Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan. *Journal of Civic Education*, 5(1), 90-100.
- Sari, R. P. P., & Montessori, M. (2021). Upaya Pemerintah dan Masyarakat dalam Mengatasi Masalah Stunting pada Anak Balita. *Journal of Civic Education*, 4(2), 129-136.
- Strategi Dinas Ketahanan Pangan dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten agam tahun 2016-2021.

Rizka Ariyanti, Rahmadani Yusran, Zikri Alhadi, Hasbullah Malau. *Dinamika Pelaksanaan Kebijakan Keamanan Pangan Lokal dalam Pencegahan Stunting*

Strategi Dinas Pertanian dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten agam tahun 2016-2021.

Sugiono. (2012). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*. Bandung: Alfabeta.

Yusran, R., Barlian, E., Fatimah, S., Umar, I., & Razak, A. (2021). Reconnection of Food Policy, Environmental Ecosystem and Its Impact on Stunting Prevalence. *Central Asian Journal Of Literature, Philosophy And Culture*, 2(7), 47-52.

#### **Sumber Internet**

<https://infopublik.id/kategori/nusantara/569183/penanganan-stunting-pemkab-agam-dapat-pendampingan-dari-fkm-unand>

<https://posmetropadang.co.id/atasi-stunting-agam-melalui-pola-makan/>